

**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
TENTANG
KEGIATAN KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara melalui kegiatan-kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;

Meneguhkan keyakinan Para Pihak bahwa pengembangan hubungan dan kerja sama persahabatan antara Para Pihak akan memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan rasa saling percaya, memahami dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Mengakui bahwa dengan mempererat kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi pertahanan nasional masing-masing negara, khususnya bagi kedua Angkatan Bersenjata;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Menyetujui sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Para Pihak berdasarkan pada saling percaya dan untuk tujuan-tujuan damai.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini adalah:

- a. Pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan.

- b. Pertukaran para perwira untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf dan pelatihan profesional, saling berkunjung dan penelitian bersama.
- c. Pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatih dan bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya sesuai dengan kepentingan pertahanan Para Pihak.
- d. Kerja sama antara institusi pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan kedua negara untuk keuntungan dan kepentingan bersama Para Pihak, termasuk pertukaran teknologi, bantuan teknis, pelatihan dan produksi bersama.
- e. Pertukaran informasi intelijen antara institusi-institusi dan badan-badan terkait Para Pihak.

PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sesuai dengan hukum nasional dari masing-masing negara, Para Pihak harus memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah, yang dialihkan atau diciptakan sesuai dengan Perjanjian ini. Masalah perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak yang sah pihak ketiga, dengan mempertimbangkan sepenuhnya pembagian yang seimbang dalam kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak, akan diatur dalam persetujuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi Para Pihak di bidang kerja sama yang lebih khusus.

PASAL 4 PENGATURAN PELAKSANAAN

- 1. Para Pihak harus berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong dan mengembangkan teknik-teknik bidang pertahanan di antara kedua negara dalam kerangka Perjanjian ini.
- 2. Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara dapat membuat pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kerja sama dalam aspek-aspek tertentu.

PASAL 5 KOMITE BERSAMA

- 1. Untuk mencapai tujuan Perjanjian ini secara efektif, Para Pihak membentuk Komite Bersama Kerja sama Pertahanan, selanjutnya disebut "Komite Bersama".
- 2. Komite Bersama akan dibentuk dari wakil masing-masing Pihak dengan jumlah yang sama. Komposisi dan jumlah keseluruhan anggota akan

diputuskan oleh Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara berdasarkan kesepakatan bersama. Komite Bersama dapat termasuk para ahli, dalam jumlah yang terbatas, dari kementerian, atau departemen atau badan-badan lainnya.

3. Komite Bersama diketuai bersama oleh pejabat-pejabat senior yang berwenang dari Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua negara.
4. Komite Bersama, pada prinsipnya, bertemu setahun sekali atau lebih apabila diperlukan, secara bergantian di Indonesia atau di Republik Ceko. Waktu, tempat, agenda dan detail lain pertemuan disetujui oleh kedua Ketua.
5. Komite Bersama dapat membentuk sub-sub komite apabila dianggap perlu untuk mengimplementasikan Perjanjian ini. Sub-sub komite ini akan melapor kepada Komite Bersama.
6. Fungsi dan Tugas Komite Bersama, antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengkaji dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang menjadi kepentingan bersama.
 - b. Memfasilitasi kerja sama antara badan industri kedua negara di bidang pertahanan.
 - c. Mengusulkan program kegiatan bersama, termasuk rencana dan implementasinya.
 - d. Mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi implementasi program kegiatan-kegiatan.
 - e. Mengevaluasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari implementasi program yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian ini.
 - f. Membuat laporan bersama dari setiap pertemuan dan menyerahkan laporan tersebut pada pihak-pihak yang berwenang.
7. Ketua atau wakil dari Komite Bersama dapat, bila diperlukan, berpartisipasi pada badan-badan lain yang mungkin didirikan dalam kerangka kerja sama bilateral kedua negara.

PASAL 6 KEAMANAN

Tidak ada informasi rahasia yang dapat dialihkan antar Para Pihak dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini, hingga pengaturan keamanan khusus antar kedua belah pihak terbentuk.

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

Masing-masing Pihak akan menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini mengenai penafsiran atau implementasinya akan pertama-tama diserahkan kepada Komite Bersama untuk diselesaikan secara damai.
2. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ayat 1, kedua Ketua Komite Bersama akan membawa sengketa tersebut kepada Menteri Pertahanan kedua negara untuk penyelesaiannya.
3. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ayat 2, sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 9 AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak.

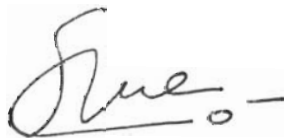
PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat pengiriman nota diplomatik di mana Para Pihak telah saling memberitahukan mengenai pemenuhan persyaratan-persyaratan sesuai hukum nasional mereka untuk pemberlakuan Perjanjian ini.
2. Perjanjian berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperpanjang dengan serta-merta untuk 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
3. Apabila Perjanjian ini diakhiri, Para Pihak akan menentukan kelanjutan dari proyek-proyek yang masih berlangsung dalam kerangka Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara jelas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT di Jakarta pada 21 November 2006 dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ceko dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



**SJAFRIE SJAMSOEDDIN
SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PEMERINTAH REPUBLIK CEKO



**JAROSLAV KOPŘIVA
DEPUTI MENTERI
KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK CEKO**

Dohoda
mezi
vládou Indonéské republiky
a
vládou České republiky
o spolupráci
v oblasti obrany

Vláda Indonéské republiky a vláda České republiky, dále jen „smluvní strany“;

přejíce si rozšířit a prohloubit existující vzájemné vztahy mezi oběma státy cestou spolupráce v oblasti obrany;

potvrzující své přesvědčení, že rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi oběma smluvními stranami přispěje k mezinárodnímu míru a bezpečnosti na základě vytvoření vzájemné důvěry, porozumění a spolupráce v mezinárodních vztazích;

uznávající, že rozšíření spolupráce v oblasti obrany přinese prospěch obraně obou států, obzvláště jejich ozbrojeným silám;

ochotny podporovat spolupráci v oblasti obranných aktivit mezi oběma státy na základě zásad rovnosti, vzájemné výhodnosti a plného respektování svrchovanosti;

v souladu s platnými právními předpisy svých států;

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Účel

Účelem této Dohody je vytvořit rámec pro rozvoj spolupráce smluvních stran v oblasti obrany, založené na vzájemné důvěře a sledující mírové účely.

Článek 2
Rozsah spolupráce

Spolupráce podle této Dohody bude zahrnovat:

a. výměnu informací týkajících se obranných institucí a záležitostí, včetně organizace, doktríny a politiky;

- b. výměnu důstojníků za účelem vzdělávání na vojenských školách a odborného výcviku, vzájemné návštěvy a společný výzkum;
- c. výměnu vědeckých a technologických údajů, expertů, techniků a instruktorů, jakož i další formy technické spolupráce, které jsou v souladu s obrannými zájmy obou smluvních stran;
- d. spolupráci mezi obrannými institucemi obou států, včetně těch, které se zabývají obrannými technologiemi a obranným průmyslem, s cílem vzájemného prospěchu obou smluvních stran, včetně výměny technologií, technické pomoci, výcviku a společné výroby;
- e. výměnu zpravodajských informací mezi příslušnými institucemi a složkami smluvních stran.

Článek 3

Práva k duševnímu vlastnictví

Smluvní strany poskytnou v souladu s právními předpisy svých států účinnou ochranu a distribuci práv k duševnímu vlastnictví, včetně jeho vlastnictví a zákonného užití, která byla převedena či vytvořena v souladu s touto Dohodou. Otázky ochrany a distribuce práv k duševnímu vlastnictví, včetně ochrany legitimních práv třetích stran, berouce plně v úvahu spravedlivý podíl na vlastnictví založený na příspěvku příslušného účastníka, budou upraveny v dohodách o specifických oblastech spolupráce, které budou sjednávány organizacemi smluvních stran.

Článek 4

Prováděcí ujednání

- 1. Smluvní strany budou usilovat o přijetí všech nezbytných opatření k podpoře a rozvoji metod spolupráce v oblasti obrany mezi oběma státy v rámci této Dohody.
- 2. Ministerstva obrany obou států mohou uzavřít zvláštní prováděcí ujednání týkající se specifických aspektů spolupráce.

Článek 5

Společný výbor

- 1. Za účelem efektivního dosahování cíle této Dohody, smluvní strany tímto zřizují Společný výbor pro spolupráci v oblasti obrany, dále jen „Společný výbor“.
- 2. Společný výbor je složen ze stejného počtu zástupců každé smluvní strany. O jeho složení a celkovém počtu členů rozhodují ministerstva obrany obou států

dohodou. Do Společného výboru mohou být v omezeném počtu začleněni rovněž experti z dalších ministerstev a jiných úřadů či orgánů.

3. Společnému výboru budou společně předsedat příslušní vyšší funkcionáři ministerstev obrany obou států.

4. Společný výbor bude zasedat zpravidla jednou ročně nebo častěji, bude li to vyžádáno, střídavě v Indonéské republice a v České republice. Datum, místo, program a další podrobnosti zasedání si mezi sebou dohodnou spolupředsedající.

5. Společný výbor může zřídit podvýbory, pokud to považuje za nezbytné k provádění této Dohody. Tyto podvýbory budou odpovědné Společnému výboru.

6. Mezi funkce a úkoly Společného výboru patří:

- a. prozkoumávání a identifikace oblastí spolupráce, na nichž je společný zájem;
- b. napomáhání spolupráci mezi průmyslovými entitami obou států v oblasti obrany;
- c. příprava programu společných aktivit, včetně jeho plánování a provádění;
- d. koordinace, monitorování a řízení přijatého programu aktivit;
- e. rozbor a řešení problémů vzniklých při realizaci stanoveného programu v rámci provádění této Dohody;
- f. vypracování společné zprávy z každého zasedání a její předkládání příslušným orgánům.

7. Spolupředsedající či zástupci Společného výboru se mohou, pokud to bude vhodné, účastnit činnosti jiných orgánů, které mohou být zřízeny v rámci dvoustranné spolupráce mezi oběma státy.

Článek 6

Ochrana utajovaných skutečností

Smluvní strany si v rámci provádění této Dohody nebudou předávat utajované skutečnosti, pokud nebude mezi nimi sjednána zvláštní smlouva o ochraně utajovaných skutečností.

Článek 7 Náklady

Každá smluvní strana ponese náklady spojené s prováděním této Dohody samostatně.

Článek 8 Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor, který vznikne v souvislosti s výkladem nebo prováděním této Dohody, bude nejdříve předložen Společnému výboru k přátelskému urovnání.
2. V případě, že spor nebude vyřešen podle odstavce 1, předají oba spolupředsedající Společného výboru záležitost k vyřešení ministrům obrany svých států.
3. V případě, že spor nebude vyřešen podle odstavce 2, bude řešen smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 9 Změny

Tato Dohoda může být kdykoliv měněna písemnou formou na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení diplomatických nót, jejichž prostřednictvím se smluvní strany vzájemně informují o splnění podmínek stanovených svými vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.
2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu 5 (pět) let a bude automaticky prodlužována na dalších 5 (pět) let, pokud jedna ze stran její platnost neukončí písemným oznámením alespoň 6 (šest) měsíců před jejím vypršením.
3. V případě ukončení platnosti této Dohody smluvní strany rozhodnou za jasně stanovených podmínek o dalším průběhu započatých projektů uzavřených v rámci této Dohody.

Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci svých vlád podepsali tuto Dohodu.

Dáno v *Jakartě* dne *21. listopadu* 2006 ve dvou původních vyhotoveních, v indonéském, českém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

**Za vládu
Indonéské republiky**



SJAFRIE SJAMSOEDDIN
Generální tajemník
Ministerstva obrany
Indonéské republiky

**Za vládu
České republiky**



JAROSLAV KOPŘIVA
Náměstek ministra
obran
České republiky

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC
ON
COOPERATION ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two states through cooperative activities in the field of defence;

Affirming Parties conviction that the developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to both national defences, particularly Armed Forces;

Willing to promote cooperation in defence activities between the two states based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
PURPOSE**

The purpose of this Agreement is to provide a framework in order to promote cooperation of the Parties in the field of defence based on mutual trust and for the peaceful purposes.

**ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION**

The Scope of cooperation of this Agreement shall include:

- a. Exchange of information on defence establishment and matters, including the organization, doctrine and policy.

- b. Exchange of officers for education in staff-colleges and professional training, mutual visits, and joint research.
- c. Exchange of scientific and technological data, experts, technicians, trainers, as well as other forms of technical cooperation in accordance with the defence interests of the Parties.
- d. Cooperation between the defence institutions to include defence technology and industries of the two countries for the mutual benefit and interest of the Parties, including exchange of technology, technical assistance, training and joint production.
- e. Exchange of intelligence information between relevant institutions and agencies of the Parties.

ARTICLE 3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In accordance with the legislation of their states the Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this Agreement. The issues of protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, shall be regulated by the agreements concluded by organizations of the Parties on specific areas of cooperation.

ARTICLE 4 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

- 1. The Parties shall endeavour to take all necessary measures to encourage and develop defence techniques between the two states within the framework of this Agreement.
- 2. The Ministry or Department of Defence of the both states may conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation.

ARTICLE 5 JOINT COMMITTEE

- 1. In order to effectively pursue the objective of this Agreement, the Parties establish herein a Joint Defence Cooperation Committee, hereinafter referred to as the "Joint Committee".
- 2. The Joint Committee shall be composed of an equal number of representatives from each Party. Its composition and total number of members shall be decided upon by the Ministry or Department of Defence

of the both states based on mutual consent. The Joint Committee may include experts, in limited numbers, from other ministries, departments or agencies.

3. The Joint Committee shall be co-chaired by the appropriate senior officials from the Ministry or Department of Defence of the both states.
4. The Joint Committee shall meet, in principle, once a year, or more when required, alternately in Indonesia and the Czech Republic. The date, place, agenda and other details of the meeting will be agreed upon between the Co-Chairmen.
5. The Joint Committee may set up sub-committees when it deems necessary for implementation of this Agreement. These sub-committees shall report to the Joint Committee.
6. The functions and tasks of the Joint Committee, inter alia, are as follow:
 - a. To explore and to identify the areas of cooperation of common interest.
 - b. To facilitate co-operation between industrial entities of the both states in the field of defence.
 - c. To draw program of joint activities, including its planning and implementation.
 - d. To coordinate, monitor and control the implemented program of activities.
 - e. To evaluate and resolve problems arising out from the implementation of the designated program in the implementation of this Agreement.
 - f. To work out a joint report of each meeting and to submit the report to their respective authorities.
7. The Co-Chairmen or representatives of the Joint Committee may, if appropriate, participate in other bodies which may be established within the framework of bilateral co-operation between both states.

ARTICLE 6 SECURITY

No classified information shall be transferred between the Parties in the framework of this Agreement, until a special security arrangement is concluded between them.

ARTICLE 7 EXPENSES

Each Party shall bear alone its expenses connected to the implementation of this Agreement.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute arising from this Agreement with respect to its interpretation or implementation shall in the first instance be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.
2. In the event that the dispute is not settled under paragraph 1, both Co-Chairmen of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence of their states for settlement.
3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

ARTICLE 9 AMENDMENT

This Agreement may be amended at anytime in writing by mutual consent of the Parties.

ARTICLE 10 FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force upon delivery of diplomatic note through which the Parties have informed each other on completion of fulfillment of the requirements set up by their domestic legislation for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for another 5 (five) years unless either Party terminate it by giving written notification at least 6 (six) months prior to its expiration.
3. In the event of the termination of this Agreement, the Parties shall determine a further course of the ongoing projects concluded in the framework of this Agreement on clearly defined terms and conditions.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on 21st, November, 2006 in two originals, in Indonesian, in Czech and in English language, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**SJAFRIE SJAMSOEDDIN
SECRETARY GENERAL
OF THE DEPARTMENT OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE CZECH REPUBLIC**



**JAROSLAV KOPŘIVA
DEPUTY MINISTER
OF THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE CZECH REPUBLIC**